

BAB 2 LANDASAN TEORI

2.1 Teori-teori pertumbuhan ekonomi

Kemajuan ekonomi suatu daerah menunjukkan keberhasilan suatu pembangunan meskipun bukan merupakan satu-satunya indikator keberhasilan pembangunan (Todaro:2006). Ada tiga macam ukuran untuk menilai pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan output, pertumbuhan output per pekerja, dan pertumbuhan output per kapita. Pertumbuhan output digunakan untuk menilai pertumbuhan kapasitas produksi yang dipengaruhi oleh adanya peningkatan tenaga kerja dan modal di wilayah tersebut. Pertumbuhan output per tenaga kerja sering digunakan sebagai indikator adanya perubahan daya saing wilayah tersebut (melalui pertumbuhan produktivitas). Sedangkan pertumbuhan output per kapita digunakan sebagai indikator perubahan kesejahteraan ekonomi (Bhinadi:2003).

Ada beberapa teori mengenai pertumbuhan seperti yang diuraikan sebagai berikut.

2.1.1 Teori Rostow dan Teori Harrod-Domar

Teori Rostow menjelaskan bahwa ada tahap-tahap yang dilewati suatu negara dalam pertumbuhan ekonomi. Salah satu cara untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi adalah dengan memperkuat tabungan nasional. Teori ini diperjelas lagi dengan teori Harrod-Domar yang menyebutkan bahwa semakin banyak porsi PDB yang ditabung akan menambah *capital stock* sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Kedua teori tersebut menjelaskan bahwa tingkat tabungan dan *capital stock* yang tinggi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun beberapa studi empiris menunjukkan hasil yang berbeda antara negara-negara di Eropa Timur dan di Afrika. Hal ini menunjukkan adanya faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, seperti kualitas SDM dan infrastruktur pendukung (Todaro : 2006).

2.1.2 Teori Transformasi Struktural

Teori ini berfokus pada mekanisme yang membuat negara-negara miskin dan berkembang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara mentransformasi struktur perekonomiannya dari yang semula sektor pertanian yang bersifat tradisional menjadi dominan ke sektor industri manufaktur yang lebih modern dan sektor jasa-jasa. Teori ini dipelopori oleh W. Arthur Lewis.

Menurut Lewis, dalam perekonomian yang terbelakang ada 2 sektor yaitu sektor pertanian dan sektor industri manufaktur. Sektor pertanian adalah sektor tradisional dengan marjinal produktivitas tenaga kerjanya nol. Dengan kata lain, apabila tenaga kerjanya dikurangi tidak akan mengurangi output dari sektor pertanian. Sektor industri modern adalah sektor modern dan output dari sektor ini akan bertambah bila tenaga kerja dari sektor pertanian berpindah ke sektor modern ini. Dalam hal ini terjadi pengalihan tenaga kerja, peningkatan output dan perluasan kesempatan kerja. Masuknya tenaga kerja ke sektor modern akan meningkatkan produktivitas dan meningkatkan output.

2.1.3 Teori Solow

Teori ini menjelaskan bagaimana tingkat tabungan dan investasi, pertumbuhan populasi dan kemajuan teknologi mempengaruhi tingkat output perekonomian dan pertumbuhannya sepanjang waktu (Mankiw:2000). Dalam teori ini perkembangan teknologi diasumsikan sebagai variabel yang eksogen. Hubungan antara output, modal dan tenaga kerja dapat ditulis dalam bentuk fungsi sebagai berikut.

$$y = f(k) \dots\dots(1)$$

Dari persamaan 1 terlihat bahwa output per pekerja (y) adalah fungsi dari *capital stock* per pekerja. Sesuai dengan fungsi produksi yang berlaku hukum “the law of deminishing return”, dimana pada titik produksi awal, penambahan kapital per labor akan menambah output per pekerja lebih banyak, tetapi pada titik tertentu penambahan *capital stock* per pekerja tidak akan menambah output per pekerja dan bahkan akan bisa mengurangi output per pekerja. Sedangkan fungsi investasi dituiskan sebagai berikut.

$$i = s f(k) \dots\dots(2)$$

Dalam persamaan tersebut, tingkat investasi per pekerja merupakan fungsi *capital stock* per pekerja. *Capital stock* sendiri dipengaruhi oleh besarnya investasi dan penyusutan dimana investasi akan menambah *capital stock* dan penyusutan akan mengurangnya.

$$\Delta k = i - \gamma k_t \dots\dots\dots(3), \gamma \text{ adalah porsi penyusutan terhadap } \textit{capital stock}.$$

Tingkat tabungan yang tinggi akan berpengaruh terhadap peningkatan *capital stock* dan akan meningkatkan pendapatan sehingga memunculkan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Tetapi dalam kurun waktu tertentu pertumbuhan ekonomi akan mengalami perlambatan jika telah mencapai apa yang disebut *steady-state level of capital*. Kondisi ini terjadi jika investasi sama dengan penyusutan sehingga akumulasi modal.

Selain tingkat tabungan, pertumbuhan juga dipengaruhi oleh pertumbuhan populasi. Pertumbuhan populasi lebih bisa menjelaskan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Populasi meningkatkan jumlah labor dan dengan sendirinya akan mengurangi *capital stock* per pekerja. Tingkat pertumbuhan populasi dan tingkat penyusutan secara bersama-sama akan mengurangi *capital stock*. Pengaruh pertumbuhan populasi secara matematis dapat ditulis sebagai berikut.

$$\Delta k = sf(k) - (\gamma + n) k_t, \dots\dots\dots(4)$$

dimana n adalah tingkat pertumbuhan populasi. Dalam teori ini diprediksi bahwa negara-negara dengan pertumbuhan populasi yang tinggi akan memiliki GDP perkapita yang rendah (Mankiw : 2000).

Kemajuan teknologi dalam teori Solow dianggap sebagai faktor eksogen. Dalam perumusan selanjutnya fungsi produksi adalah $Y = f(K, L, E)$, dimana E adalah efisiensi tenaga kerja. Selanjutnya y adalah Y/LE dimana LE menunjukkan jumlah tenaga kerja efektif. Pengaruh dari kemajuan teknologi terhadap perubahan modal dapat dirumuskan sebagai

$$\Delta k = sf(k) - (\gamma + n + g) k_t, \dots\dots\dots(5)$$

dimana g menggambarkan kemajuan teknologi melalui efisiensi tenaga kerja. Dampak dari kemajuan teknologi adalah dapat memunculkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan karena mengoptimalkan efisiensi tenaga kerja yang terus tumbuh.

Menurut teori Solow ada beberapa hal yang dilakukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Meningkatkan porsi tabungan akan meningkatkan akumulasi modal dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Selain itu meningkatkan investasi yang sesuai dalam perekonomian baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik. Mendorong kemajuan teknologi dapat meningkatkan pendapatan per tenaga kerja sehingga pemberian kesempatan untuk berinovasi pada sektor swasta akan berpengaruh besar dalam pertumbuhan ekonomi.

2.1.4 Teori Pertumbuhan Endogen

Teori-teori selanjutnya adalah teori pengembangan model Solow. Diantaranya teori pertumbuhan endogen yang berusaha menjelaskan bahwa sumber-sumber pertumbuhan adalah peningkatan akumulasi modal dalam arti yang luas. Modal dalam hal ini tidak hanya dalam sifat fisik tetapi juga yang bersifat non-fisik berupa ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan teknologi ini akan mengembangkan inovasi sehingga meningkatkan produktivitas dan berujung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Adanya penemuan-penemuan baru berawal dari proses *learning by doing*, yang dapat memunculkan penemuan-penemuan baru yang meningkatkan efisiensi produksi. Efisiensi ini yang dapat meningkatkan produktivitas. Sehingga dalam hal ini kualitas sumber daya manusia adalah faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.1.5 Teori Pertumbuhan Solow Dengan Unsur *Human Capital*

Teori ini memasukkan unsur *human capital* sebagai unsur yang berpengaruh terhadap pertumbuhan. *Human capital* berperan sama dengan kapital yang bersifat fisik. Model awal teori ini ditulis sebagai

$$Y(t) = K(t)^\alpha \{A(t)H(t)\}^{1-\alpha} \dots\dots\dots(6) .$$

Y : output

K : persediaan modal fisik

A : kemajuan teknologi

H : *labor service*

K dan H bersama-sama mempengaruhi output dan berlaku *constant return to scale*. Variabel H bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan jumlah tenaga kerja sebagaimana dinotasikan sebagai berikut.

$H(t) = L(t) G(E)$, dimana L adalah jumlah tenaga kerja, G adalah fungsi dari *human capital* per tenaga kerja yang digambarkan dalam tingkat pendidikan tenaga kerja (E). Variabel K dan L adalah dinamik dan dinotasikan sebagai berikut.

$$K = sK Y(t) \text{ dan } L = nL(t)$$

sK adalah bagian dari output yang disisihkan untuk akumulasi modal dengan asumsi tidak ada depresiasi, dan n adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan jumlah tenaga kerja. Sementara itu teknologi sebagai faktor yang eksogen, dan SDM dinotasikan sebagai berikut $H(t) = sH Y(t)$ dimana sH adalah bagian dari sumber daya yang dicurahkan untuk akumulasi modal sumber daya manusia.

Dalam *accounting growth* persamaan i bisa diubah diubah dalam bentuk logaritma natural dengan membagi masing-masing sisi dengan L sehingga menjadi sebagai berikut.

$$\ln Y_i/L_i = \alpha \ln K_i/L_i + (1-\alpha) \ln H_i/L_i + (1-\alpha) \ln A_i \dots\dots\dots(7).$$

Persamaan (7) menggambarkan kontribusi kapital per tenaga kerja, *labor service per worker*, dan residual terhadap *output per worker*. Persamaan tersebut dapat diturunkan lagi dengan mengurangi $\alpha \ln (Y_i/L_i)$ dan hasilnya adalah sebagai berikut.

$$\ln Y_i/L_i = \alpha/(1-\alpha) \ln K_i/Y_i + \ln H_i/L_i + \ln A_i \dots\dots\dots(8).$$

Persamaan (8) menggambarkan output per tenaga kerja yang dipengaruhi oleh *capital-output ratio* (K/Y), *labor services per worker* dan residual. Persamaan (7) dan (8) tidak jauh berbeda, tetapi persamaan jauh (8) lebih menggambarkan perubahan dalam jangka panjang dalam variabel *labor service per worker* (H/L) dan residual (A) (Romer : 2006). A adalah residual yang menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi *output per worker*, dimana termasuk di dalamnya adalah kemajuan teknologi.

2.2 Konsep Desentralisasi

Menurut kamus *Webster's Third New International Dictionary* dalam Saragih (2003) desentralisasi adalah pelimpahan atau distribusi tugas dan wewenang dari otoritas pusat kepada pemerintah daerah atau pemerintah lokal. Dengan adanya desentralisasi, mobilitas penduduk, kekuatan suara dan persaingan antar

pemerintah lokal akan lebih menjamin kesesuaian jasa layanan publik dengan apa yang diinginkan masyarakatnya. Persaingan yang kompetitif dan kesesuaian ini akan menciptakan efisiensi (Tiebout : 1956).

Dengan demikian, pelaksanaan desentralisasi bertujuan agar masyarakat lebih mendapatkan layanan publik yang sesuai dengan preferensi mereka sehingga tercipta efisiensi. Efisiensi akan meningkatkan produktivitas dan produktivitas yang tinggi akan memacu pertumbuhan ekonomi.

2.3 Konsep Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal adalah salah satu jenis desentralisasi selain desentralisasi politik, desentralisasi politik dan desentralisasi ekonomi (World Bank : 2000) yang dikutip (Adirinekso : 2001). Tanggungjawab keuangan adalah komponen inti dari desentralisasi fiskal, dimana fungsi desentralisasi akan berjalan efektif jika ada anggaran yang cukup untuk mendukungnya. Adirinekso (2001) menyebutkan ada beberapa bentuk desentralisasi fiskal yaitu :

1. Pembiayaan sendiri atau pengembalian biaya melalui pajak
2. Pengaturan pembiayaan atau produksi antar pengguna dalam menyediakan infrastruktur melalui kontribusi tenaga kerja dan uang
3. Perluasan penerimaan lokal melalui pajak kepemilikan dan penjualan serta pungutan tidak langsung
4. Adanya dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah
5. Kewenangan daerah untuk mengelola pinjaman daerah.

Saragih (2003) menyebutkan bahwa desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal menganut prinsip *money follow function*, dalam artian adanya pelimpahan wewenang membawa konsekuensi pada peningkatan anggaran untuk melaksanakan wewenang tersebut. Dengan demikian kebutuhan anggaran daerah untuk melakukan desentralisasi semakin besar. Sebagai konsekuensinya adalah adanya kebijakan dana perimbangan dari

pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Namun demikian, dalam pengelolaan pembiayaan desentralisasi harus memperhatikan prinsip efisiensi. Anggaran untuk pelaksanaan tugas desentralisasi harus dikelola secara efisien namun tetap menghasilkan output yang maksimal (Saragih:2003).

Melloche, Vailaicourt dan Yelmaz (2004) dalam Pusporini (2006) menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal terkait dengan tiga hal, yaitu devolusi, delegasi dan dekonsentrasi.

1. Devolusi, yaitu pelimpahan wewenang bidang keuangan dan administrasi kepada level pemerintahan yang lebih rendah yang disertai dengan diskresi yang tidak dapat dikontrol oleh pemerintah. Dalam hal pemerintah daerah yang belum sepenuhnya melaksanakan tugas yang dilimpahkan akan mendapat supervisi dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah diberi wewenang sepenuhnya di wilayahnya untuk menggali potensi pendapatan daerah tersebut.
2. Delegasi, pelimpangan wewenang untuk tugas tertentu kepada pemerintah daerah dan masih ada kontrol tidak langsung dari pemerintah pusat.
3. Dekonsentrasi, pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat di daerah yang masih mempunyai susunan hierarki dengan pemerintah pusat.

Desentralisasi fiskal terbagi dalam 2 unsur yaitu *expenditure assignment* dan *revenue assignment* (Haryanto: 2006). *Expenditure assignment* terkait dengan tugas-tugas yang dilimpahkan ke level pemerintah yang lebih rendah. Pelimpahan tugas ini ada 2 tahap yaitu:

1. Menetapkan 5 urusan yang menjadi wewenang pusat, yaitu : Hankam, Luar negeri, Fiskal, Moneter dan Agama. Untuk 11 urusan pelayanan publik lainnya menjadi wewenang daerah dengan catatan yang menjadi skala nasional tetap menjadi wewenang pusat
2. Membagi wewenang antara pusat, provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Dari sisi *revenue assignment*, pengalihan sumber pendapatan dari pusat ke daerah akan meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai tugas desentralisasi. Pelimpahan sumber pendapatan ini bisa melalui wewenang yang lebih luas untuk memungut pajak dan retribusi atau dalam bentuk transfer dana perimbangan dari pusat ke daerah.

Sementara itu Bahl (1998) mengemukakan adanya prinsip-prinsip untuk melaksanakan desentralisasi fiskal, yaitu

1. Desentralisasi fiskal adalah sebuah sistem yang komprehensif yang melibatkan level pemerintahan dan mendukung desentralisasi secara umum
2. Prinsip *money follow function*, dimana pelimpahan wewenang harus diikuti dengan anggaran yang memadai untuk melaksanakan wewenang tersebut
3. Adanya kemampuan yang kuat untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan desentralisasi dari pemerintah pusat
4. Harus memperhatikan karakteristik dan kemampuan masing-masing daerah dalam memberikan wewenang
5. Harus ada *taxing power* yang kuat dari pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas-tugas desentralisasi
6. Pemerintah pusat harus konsisten dalam melaksanakan desentralisasi dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya
7. Dibuat sesederhana mungkin dengan formula yang tidak rumit terutama dalam pelimpahan wewenang
8. Desain dana perimbangan harus sesuai dengan tujuan dari desentralisasi fiskal
9. Desentralisasi fiskal harus memperhatikan kepentingan-kepentingan dari tiap level pemerintahan agar tidak terjadi tumpang tindih tugas dan wewenang
10. Sistem yang dikembangkan dalam dana perimbangan bisa disesuaikan dengan perkembangan yang ada
11. Harus ada daerah yang sukses dan menjadi daerah percontohan untuk pelaksanaan desentralisasi fiskal.

Dari beberapa uraian di atas, desentralisasi fiskal adalah sebagai konsekuensi dari adanya pelimpahan wewenang sehingga daerah juga lebih leluasa untuk mendapatkan anggaran lebih untuk melaksanakan tugas desentralisasi. Pemerintah daerah dalam meningkatkan anggaran bisa melalui optimalisasi penerimaan daerah sendiri dan transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat.

2.4 Sumber-sumber penerimaan daerah

Pelaksanaan desentralisasi membawa pengaruh pada kebutuhan anggaran bagi pemerintah daerah untuk melakukan tugas-tugas desentralisasi. Menurut UU no. 33 tahun tahun 2004, sumber-sumber penerimaan daerah dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d. Lain-lain PAD yang sah
2. Dana perimbangan
 - a. Dana Bagi Hasil
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU)
 - c. Dana Alokasi Khusus (DAK)
3. Lain-lain pendapatan yang terdiri dari pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat

2.4.1 Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU 33/2003, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Unsur utama dari PAD adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak ada imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU no. 28/2009). Sedangkan retribusi adalah sejumlah pungutan untuk menutup biaya atas jasa layanan publik yang disediakan pemerintah (Davey:1988). PAD merupakan sumber utama dari daerah untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan daerah.

Seiring dengan adanya desentralisasi fiskal, maka daerah dituntut kreativitas mengoptimalkan PAD-nya untuk membiayai tugas-tugas desentralisasi. Namun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana dengan mengoptimalkan PAD namun tanpa membebani perekonomian karena adanya pungutan pajak dan retribusi (Saragih:2003). Jika PAD daerah meningkat maka daerah mempunyai

kemandirian keuangan dan mampu melaksanakan desentralisasi. Namun jika peningkatan PAD tidak disertai dengan perekonomian yang berkembang berarti pelaksanaan desentralisasi masih belum berhasil.

2.4.2 Dana Perimbangan

Dana perimbangan juga sebagai salah satu konsekuensi dari pelaksanaan desentralisasi untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah. Dana perimbangan juga untuk mengurangi ketimpangan baik vertikal maupun ketimpangan horizontal. Ketimpangan fiskal antar daerah bisa muncul karena adanya perbedaan karakter tiap-tiap daerah baik dari luas wilayah, jumlah dan kualitas penduduk, kondisi geografis dan potensi sumber daya alam (Saragih:2003). Ada beberapa alasan dilakukan transfer dana perimbangan dari pusat ke daerah, antara lain :

1. Untuk mengurangi ketimpangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (ketimpangan vertikal)
2. Untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah (ketimpangan horizontal)
3. Untuk menjaga tetap tercapainya standar pelayanan minimal di tiap daerah
4. Untuk mengatasi masalah menyebarnya efek pelayanan publik (*interjurisdictional spill-over effect*)
5. Untuk mencapai tujuan stabilisasi dari pemerintah pusat, terutama untuk dana transfer yang bersifat modal (*capital grant*) (Simanjuntak:2001) dalam (Arsyad:2003).

Dana perimbangan dapat digolongkan sifatnya menjadi *block grant* dan *specific grant*. *Block grant* adalah dana transfer yang diberikan kepada daerah dengan formula tertentu untuk membiayai wilayahnya. Sedangkan *specific grant* adalah dana transfer untuk tujuan tertentu, dengan syarat yang tertentu juga dimana tiap negara berbeda kebijakannya (Pusporini : 2006). Di Indonesia ada tiga macam dana perimbangan yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DAU dan DBH lebih bersifat *block grant* dan DAK lebih bersifat *specific grant*.

DAU dilihat dari fungsinya adalah sebagai pengurang ketimpangan fiskal baik secara vertikal maupun horizontal. Selain itu untuk membantu daerah untuk dapat melakukan standar pelayanan minimal. Dalam pengalokasian DAU

diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut (A.T.P.Panggabean, Mahi, M.P.H. Panggabean dan Brodjonegoro : 1999).

1. Kecukupan, artinya dana yang diberikan ke daerah harus cukup sesuai dengan fungsi daerah tersebut. Bila DAU mampu berespon terhadap peningkatan beban anggaran yang relevan, maka sistem DAU bisa dikatakan memenuhi prinsip kecukupan
2. Netral dan efisien, dalam artian tidak menimbulkan distorsi dalam perekonomian daerah
3. *Accountability*, dalam artian harus dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya dengan melibatkan DPRD dan masyarakat luas. DAU bersifat *block grant* sehingga penggunaannya menjadi kewenangan daerah
4. Relevan dengan tujuan yang ditentukan, yaitu stimulasi perekonomian daerah, peningkatan demokrasi, keadilan/pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. DAU menjadi alat stimulasi ekonomi melalui 3 cara yaitu : (a) penciptaan efisiensi alokasi, (b) membantu menciptakan kombinasi input produksi yang lebih optimal (c) berperan dalam memobilisasi sumberdaya keuangan daerah.
5. Keadilan; Adil disini bukan berarti harus pemeratakan pendapatan antar daerah, tetapi pemeratakan ketersediaan sumber dana antara pemerintah daerah. Dalam hal keadilan adalah bahwa terdapat variasi beban untuk menyediakan layanan minimal dan sumberdaya keuangan tiap daerah. Dengan adanya DAU, setidaknya telah diupayakan tiap daerah mempunyai *basic endowment* yang sama. Walaupun demikian tidak berarti dengan pijakan yang sama akan menghasilkan *outcome* yang sama, karena banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan penggunaan dana DAU.
6. Obyektif dan transparan. Sistem alokasi DAU harus jauh dari kemungkinan manipulasi, sehingga alokasi dan formula-nya harus obyektif dan transparan serta menggunakan variabel-variabel yang tidak menimbulkan interpretasi yang bertentangan.
7. sederhana dalam perumusan formulanya.

Sedangkan DBH adalah untuk mengurangi ketimpangan terutama ketimpangan vertikal dimana DBH yang terutama adalah pajak pusat dan dari Sumber Daya Alam dibagi ke daerah dengan formula tertentu. Dalam Peraturan Pemerintah no. 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, pada umumnya daerah kabupaten/kota yang menghasilkan sumber dana mendapatkan bagian yang paling besar. Sebagian kecil dibagi rata dengan daerah-daerah yang lain, Sehingga dengan kata lain daerah yang lebih banyak menghasilkan akan mendapat DBH yang lebih besar. Dana transfer ini juga berperan dalam memperkuat kemampuan fiskal daerah.

DAU dan DBH disamping untuk mengurangi ketimpangan juga sebagai instrumen yang memperkuat kemampuan keuangan daerah untuk melakukan tugas desentralisasi. Seharusnya pemberian dana transfer tersebut mampu membantu daerah untuk melaksanakan pembangunan daerahnya dan salah satu indikatornya adalah peningkatan perekonomian daerah tersebut.

2.5 Penelitian-penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang mengkaitkan desentralisasi fiskal yang biasanya dikaitkan dengan variabel-variabel keuangan daerah dengan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pujiati (2008) melakukan studi untuk mengetahui hubungan antara PAD, DAU, DBH dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di propinsi Jawa Tengah. Hasilnya adalah PAD, DBH dan tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk variabel DAU berpengaruh negatif dan signifikan. Temuan mengenai DAU ini menunjukkan adanya pemanfaatan DAU yang belum maksimal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan adanya indikasi kebocoran dana DAU. Hasil studi oleh Pusporini (2006) meneliti hubungan antara PAD, dana perimbangan, PDRB perkapita dan jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi serta menguji apakah ada perbedaan antara daerah kabupaten atau kota dan daerah Jawa-Bali atau luar Jawa-Bali. Hasilnya PAD dan dana perimbangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi meskipun pengaruhnya kecil. Variabel PDRB perkapita dan variabel penduduk sebagai variabel kontrol berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan lain

adalah bahwa tidak ada perbedaan pertumbuhan ekonomi yang signifikan antara daerah kabupaten dengan kota serta daerah Jawa-Bali dengan daerah luar Jawa-Bali.

Ahmad (2005) dalam salah satu temuannya menyebutkan bahwa porsi pajak daerah terhadap PAD berpengaruh positif terhadap PDRB riil. Penelitian oleh Haryanto (2006) menunjukkan bahwa PAD berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengaruh negatif ini menunjukkan bahwa pajak dan retribusi sebagai komponen terbesar PAD yang dipungut pemerintah daerah tidak memberikan efek multiplier pada perekonomian tetapi justru membebani masyarakat dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Temuan yang lain adalah bahwa daerah yang kaya perekonomiannya tumbuh dengan cepat dibandingkan daerah menengah dan miskin. Fatimah (2005) dalam studinya menunjukkan hasil bahwa pemungutan pajak berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kesimpulannya adalah bahwa pemungutan pajak oleh daerah ternyata justru membebani masyarakat dan mengurangi daya beli masyarakat sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Temuan lain adalah dana transfer berupa DAU berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Studi yang dilakukan Arsyad (2003) ditemukan bahwa dana perimbangan baik dana transfer dan dana bagi hasil berdampak positif terhadap peningkatan PDRB. Sementara itu untuk mengatasi ketimpangan, dana bagi hasil lebih mampu berperan dibandingkan dana transfer. Temuan lain adalah tenaga kerja mempunyai kontribusi yang lebih besar terhadap produksi dibandingkan modal. Kharisma (2006) dalam studinya menyebutkan bahwa pada awal-awal pelaksanaan desentralisasi fiskal (2001-2004) terjadi peningkatan peran PAD terhadap pertumbuhan ekonomi dibandingkan sebelum desentralisasi fiskal. Sementara dana perimbangan berdampak positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Bhinadi (2003) meneliti hubungan antara variabel modal, kualitas SDM dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasilnya variabel modal berpengaruh positif dan mempunyai kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Kualitas SDM berpengaruh positif dengan kontribusi yang kecil terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel tenaga kerja ternyata berpengaruh negatif. Pengaruh negatif ini menunjukkan telah terjadi inefisiensi dalam

penggunaan tenaga kerja untuk proses produksi. Implikasi dari temuan ini bukan berarti harus mengurangi jumlah tenaga kerja, tetapi harus ada peningkatan kualitas SDM dari tenaga kerja tersebut untuk meningkatkan efisiensi.

Sementara itu Budiono (2001) berusaha meneliti tentang hubungan antara kualitas SDM dengan pertumbuhan ekonomi. Hasilnya menunjukkan bahwa kualitas SDM berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi. Kualitas SDM bisa dilihat dari bergesernya tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan menciptakan tenaga kerja yang lebih efisien dan meningkatkan produktivitas. Pergeseran tingkat pendidikan tenaga kerja akan diikuti perpindahan tenaga kerja secara sektoral dari sektor tradisional ke sektor modern dan secara geografis berpindah dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan.

2.6 Literatur Alat (*Tools*) Untuk Penelitian

Penelitian ini menggunakan alat ukur ekonometrika dengan cara regresi linear. Ekonometrika secara harfiah adalah sebagai “ ukuran-ukuran ekonomi”. Pengertian ekonometrika secara umum adalah suatu ilmu yang mempelajari analisis kuantitatif dari fenomena ekonomi dalam artian secara umum (Nachrowi: 2006). Salah satu metode pengukurannya adalah metode regresi linear. Metode regresi linear membutuhkan data-data historis baik secara *time series* maupun *cross section*. Dalam metode ini data-data yang bersifat historis dianggap membentuk suatu pola tertentu sehingga bisa digunakan untuk proyeksi dan peramalan ke depan.

Teknik ekonometrika dilakukan melalui beberapa tahap yaitu (1) mengajukan pertanyaan berdasarkan teori yang ada (2) Menyusun model untuk menjawab pertanyaan yang telah dibuat (3) Estimasi parameter dari model (4) Verifikasi parameter sesuai dengan model atau tidak (5) Jika hasil verifikasi layak maka model bisa digunakan untuk memprediksi variabel (6) Hasil prediksi dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan (Nachrowi : 2006) .

Pada tahap pembentukan model, keterkaitan antara variabel dependen dengan variabel independen harus bisa dijelaskan melalui teori-teori atau dengan logika. Berdasarkan teori-teori dan logika yang dipakai, ditentukan dugaan

hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen berbanding lurus atau berbanding terbalik.

Dalam regresi linear ada beberapa macam data yang digunakan, yaitu data yang bersifat *time series*, bersifat *cross section* dan kombinasi antara data bersifat *time series* dan bersifat *cross section*. Data *time series* adalah data yang menggambarkan data pada satu objek tertentu dalam rentang waktu yang lebih dari satu periode. Data *cross section* menggambarkan dua atau lebih objek data pada satu periode waktu. Sedangkan data panel adalah kombinasi keduanya dimana terdapat beberapa objek dalam beberapa periode waktu.

Dalam penelitian ini digunakan data panel. Untuk mengestimasi parameter model dengan data panel ada tiga metode yaitu :

1. *Ordinary Least Square (OLS)*

Metode ini tak ubahnya seperti regresi untuk data *time series* maupun *cross section*, tetapi data-data tersebut digabungkan (*pool data*). Gabungan data *time series* dan *cross section* tersebut diregresi dengan metode OLS. Dalam metode ini intersep semua individu dianggap sama. Padahal dalam kenyataan sangat kecil sekali kemungkinan tiap-tiap individu memiliki konstanta yang sama. Intersep dapat mencerminkan keadaan awal dari tiap-tiap individu tanpa ada pengaruh dari variabel independen. Dengan demikian metode ini tidak bisa menjelaskan keadaan tiap-tiap individu.

2. Model Efek Tetap (*Fixed Effect*)

Dalam metode efek tetap konstanta tiap-tiap objek kemungkinan besar berbeda dan sesuai dengan keadaan tiap objek. Yang dimaksud tetap disini adalah bahwa satu objek memiliki intersep yang besarnya tetap untuk sepanjang periode data panel. Demikian juga dengan koefisien regresi dari waktu ke waktu juga tetap. Untuk membedakan objek satu dengan objek yang lain digunakan variabel semu (*dummy*) (Winarno:2009)

3. Model Efek Random (*Random effect*)

Metode ini menghasilkan konstanta tiap objek yang kemungkinan besar juga berbeda. Metode *random effect* ini tidak menggunakan variabel semu, melainkan residual yang diduga memiliki hubungan antarwaktu dan antar objek. Dalam model ini konstanta diasumsikan bersifat random. Namun

penggunaan metode ini harus memenuhi syarat yaitu jumlah data *cross section* harus lebih besar daripada jumlah variabel yang dianalisa.

Dari ketiga metode tersebut ada kelebihan dan kelemahan. Namun *fixed effect* dan *random effect* lebih baik dalam menjelaskan model dalam data panel karena bisa membandingkan keadaan tiap-tiap individu.

Dalam regresi linear termasuk dalam menggunakan data panel, model harus terbebas dari asumsi klasik. Uji asumsi klasik pada data pada umumnya meliputi multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Multikolinearitas adalah hubungan linear antar variabel independen, heteroskedastisitas adalah bila varian dari residual tidak konstan dan autokorelasi adalah adanya korelasi antara satu data terhadap data yang lain di dalam periode waktu yangurut (Nachrowi : 2006).

Dalam pengujian statistik ada metode ANOVA (*Analysis of Variance*). Metode ini salah satunya bertujuan untuk membedakan rata-rata kelompok data tertentu terhadap kelompok data yang lain dalam satu kumpulan data penelitian. Dalam uji ANOVA dilihat nilai probabilitas, uji t dan uji F-nya. Pada umumnya hipotesis yang dibentuk pada uji ANOVA adalah sebagai berikut.

H₀ : tidak terjadi perbedaan rata-rata antar kelompok dalam populasi

H₁ : terjadi perbedaan rata-rata antar kelompok dalam populasi

Jika nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat penyimpangan tertentu misalnya 0,05, maka ada perbedaan rata-rata antar kelompok pada populasi data. Kemudian jika dilihat dari uji t, jika t hitung lebih besar dari t tabel maka terjadi perbedaan rata-rata antar kelompok dalam populasi. Jika F hitung lebih besar daripada F tabel maka terjadi perbedaan rata-rata antar kelompok pada populasi. Dengan demikian H₀ ditolak. Jika yang terjadi adalah hal sebaliknya maka H₀ tidak ditolak dalam artian tidak terjadi perbedaan rata-rata secara statistik antar kelompok dalam populasi.